



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

**SEMARANG
HEBAT!**

KECAMATAN MIJEN KOTA SEMARANG TAHUN 2016 – 2021

**KECAMATAN MIJEN
PEMERINTAH KOTA SEMARANG
TAHUN 2016**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL -----	i
DAFTAR ISI -----	ii
DAFTAR GAMBAR -----	iii
DAFTAR TABEL -----	iv
BAB I PENDAHULUAN -----	1
1.1. Latar Belakang -----	1
1.2. Landasan Hukum -----	2
1.3. Maksud dan Tujuan -----	7
1.4. Sistematika Penulisan -----	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN MIJEN -----	10
2.1. Tugas, Fungsi dan Bagan Organisasi Kecamatan Mijen -----	10
2.1.1. Tugas dan Fungsi Kecamatan Mijen -----	10
2.1.2. Struktur Organisasi Kecamatan Mijen -----	11
2.2. Sumber Daya Kecamatan Mijen -----	15
2.2.1. Sumber Daya Manusia -----	15
2.2.2. Sumber Daya Alam -----	19
2.2.3. Sarana Prasarana Aparatur -----	21
2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Mijen -----	21
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Mijen -----	23
2.4.1. Faktor Internal -----	23
2.4.2. Faktor Eksternal -----	23
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI -----	26
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Mijen -----	26
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih -----	28
3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis -----	35
3.4. Penentuan Isu-isu Strategis -----	39
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN -----	43
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Mijen -----	43
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN -----	46
BAB VI INDIKATOR KINERJA KECAMATAN MIJEN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD -----	64
BAB VII PENUTUP -----	71
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Bagan Organisasi Kecamatan Mijen -----	13
Gambar 2	Peta Kecamatan Mijen -----	16

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Daftar Perangkat Kelurahan Se-Kecamatan Mijen -----	13
Tabel 2	Pegawai Lingkungan Kecamatan Mijen Berdasarkan Eselon Jabatan -----	16
Tabel 3	Pegawai Lingkungan Kecamatan Mijen Berdasarkan Golongan-----	17
Tabel 4	Pegawai Lingkungan Kecamatan Mijen Berdasarkan Jenis Kelamin -----	18
Tabel 5	Pegawai Lingkungan Kecamatan Mijen Berdasarkan Tingkat Pendidikan -----	19
Tabel 6	Luas Wilayah Kelurahan Dan Jumlah RT RW Kecamatan Mijen -----	20
Tabel 7	Daftar Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kecamatan Mijen	21
Tabel 8	Realisasi Renstra 2011 – 2015 SKPD Kecamatan Mijen -----	22
Tabel 9	Identifikasi Permasalahan Kecamatan Mijen -----	36
Tabel 10	Identifikasi Masalah, Variabel Penyebab Yang Mempengaruhi Permasalahan dan Isu Strategis -----	40
Tabel 11	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan -----	44
Tabel 12	Matrik Penyelesaian Permasalahan Kecamatan Mijen -----	47
Tabel 13	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Mijen -----	53
Tabel 14	Indikator Kinerja Kecamatan Mijen yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD -----	67



SEMARANG
HEBAT!

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Organisasi Kecamatan merupakan unsur pelaksana teknis kewilayahan dalam daerah yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah dan juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Kecamatan Mijen terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, yaitu dengan peningkatan sarana dan prasarana wilayah, yang semua itu bertujuan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah kecamatan yang berimbas kepada kemajuan pembangunan di wilayah kecamatan.

Sejalan dengan besarnya tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan good governance, kebutuhan terhadap pelayanan publik yang berkualitas juga semakin besar. Guna merespon hal tersebut, diperlukan perencanaan pembangunan yang sistematis, terarah, menyeluruh serta tanggap terhadap dinamika tuntutan masyarakat. Perencanaan tersebut dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD).

Perencanaan Strategis (Renstra) menjadi kebutuhan nyata bagi Kecamatan Mijen, yang akan digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh jajaran organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Sesuai dengan Peraturan Walikota Semarang

Nomor 54 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kecamatan Kota Semarang, Kecamatan Mijen mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Dalam rangka meningkatkan kinerja pembangunan bidang pelayanan publik, maka Kecamatan Mijen perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) tahun 2016-2021.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Mijen Tahun 2016-2021 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renstra PD) untuk periode lima tahun ke depan. Fungsi Renstra PD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam pembangunan daerah. Renstra PD memuat visi, misi, tujuan, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RJPMD) yang bersifat indikatif.

Renstra Kecamatan Mijen Kota Semarang tahun 2016-2021 akan memberikan pedoman, arah dan tujuan yang jelas bagi Kecamatan Mijen Kota Semarang dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan tahunan selama lima tahun mendatang.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Mijen Tahun 2016-2021 merupakan rencana kerja selama lima tahun ke depan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, bagaimana mencapainya serta langkah-langkah strategis yang akan dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai.

Penyusunan Renstra PD Kecamatan Mijen Tahun 2016-2021 dilandasi dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 21,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 517);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 470);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E,Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 65);
23. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 18) ;
24. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8) ;
25. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 48);
26. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 61) ;
27. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 83);
28. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Sistem Drainase Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 92);

29. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Semarang Tahun 2015-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 98).
30. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 107).

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud dari Penyusunan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) pada Kecamatan Mijen Kota Semarang tahun 2016 – 2021 adalah sebagai pedoman dan acuan Kecamatan Mijen dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang mengacu kepada RPJMD Kota Semarang dan akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja PD.

Dalam penyusunan RPJMD Kota Semarang mengacu pada Visi dan Misi Walikota Semarang yaitu ***Semarang Kota Perdagangan dan Jasa yang HEBAT Menuju Masyarakat Semakin Sejahtera.***

1.3.2. Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Mijen Kota Semarang tahun 2016 – 2021 bertujuan sebagai berikut:

- a. Menetapkan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Kecamatan Mijen Kota Semarang dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya selama periode 2016 – 2021.

- b. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Mijen Kota Semarang dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya selama periode tahun 2016 – 2021.
- c. Memberikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan maupun lima tahunan pada periode 2016 – 2021.

1.4. Sistematika

Penyajian Rencana Strategis Kecamatan Mijen terdiri dari 7 Bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PD

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Mijen
- 2.2. Sumber Daya Kecamatan Mijen
- 2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Mijen
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Mijen

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASAKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Mijen
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Mijen

4.2. Strategi dan Kebijakan

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Menguraikan tujuan maupun sasaran yang ingin dicapai yang tertuang dalam Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Mijen.

BAB VI INDIKATOR KINERJA PD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Mengungkapkan uraian singkat tentang indikator kinerja Kecamatan Mijen.

BAB VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN MIJEN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Mijen

2.1.1. Tugas dan Fungsi Kecamatan Mijen

Tugas dan Fungsi Kecamatan Mijen adalah meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan. Adapun Tugas dan Fungsi Kecamatan berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 54 Tahun 2008, Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemerintahan, bidang pembangunan, bidang kesejahteraan sosial, bidang kependudukan serta bidang ketentraman dan ketertiban di kecamatan;
- b. penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang pemerintahan, bidang pembangunan, bidang kesejahteraan sosial, bidang kependudukan serta bidang ketentraman dan ketertiban di kecamatan;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Kecamatan;
- d. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- f. pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-Undangan;

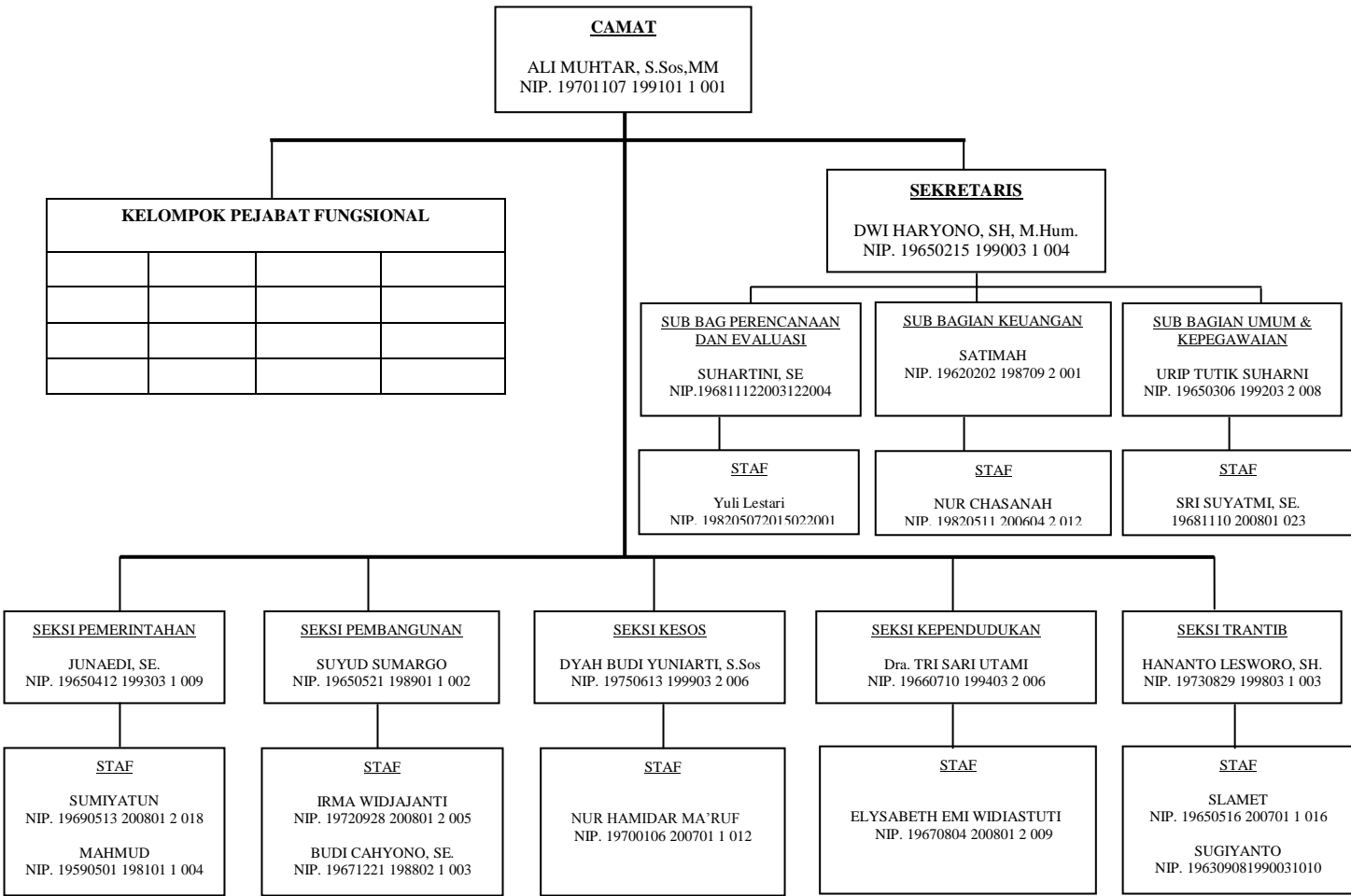
- g. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- i. pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan desa / kelurahan;
- j. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa / kelurahan;
- k. pelaksanaan fungsi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sementara;
- l. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis instansi pemerintah di wilayahnya;
- m. pengelolaan urusan Kesekretariatan Kecamatan;
- n. pelaksanaan urusan yang dilimpahkan oleh Walikota;
- o. pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Kecamatan;
- p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.2. Struktur Organisasi Kecamatan Mijen

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang, Camat dibantu oleh Sekretaris Camat yang membawahi 3 (tiga) Sub Bagian yang meliputi Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi, Sub Bagian Keuangan, dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dan juga 5 (lima) Kepala Seksi, yang meliputi Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Pembangunan, Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial, Kepala Seksi Kependudukan serta Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Formasi struktur organisasi Kecamatan Mijen tampak dalam gambar dibawah ini.

GAMBAR 1
STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN MIJEN



Kecamatan Mijen terdiri dari 14 (empat belas) kelurahan, dengan perangkat kelurahan yang tampak pada tabel berikut ini:

Tabel 1
Daftar Perangkat Kelurahan Se-Kecamatan Mijen
Per 1 Agustus 2016

N O	KELURAHAN	LURAH	SEKLUR	KASI KESOS	KASI PEMERINTAHAN	KASI PEMBANGUNAN	KASI TRANTIBUM	STAF	JUMLAH
1	Cangkiran	Rohadi Supriyanto, SH. 196210031984051004	-	Sri Margaretnaningsih 196412051986032008	Bayu Priyanto, SH 196711221990031008	Mulyadi 196510121993031012	-	Edy Purwanto 196104132006041003 Siswo Hansiwarso 196505052007011030	6
2	Bubakan	Winasis Tjatur H. SH. 196608051987121002	-	Amini 195912211983012003	Budi Saryanto, SH. 196702221993031009	-	-	-	3
3	Karangmalang	Sukiyono, SH. 196609221989031006	Kurniasih Kusumastuti 196509141985032003	Supatmi 196407061992032006	Dewi Andarita, SE. 197006212008012012	Sri Sunarti 196510101987112001	-	Suntoono 196011221985121001	6
4	Polaman	Tri Sudarmawi, S.IP. 196806121992031012	Darmaji, SH. 196003011994031002	-	Muda'i 195909041989031005	Samian 196403201993081001	Untung Muranto 196509201987031012	Hani Sulistyono 195808081987091001	6
5	Purwosari	Amad Triyoso, SH. 196209121991031011	Purwadi, SH. 196110191991031004	-	Sobaeri, SH. 196305211990031002	-	-	Nur Sodik 196808052007011000 Sujatminingsih 196801202009012001	5
6	Tambangan	Marsudiyana, SH. 196403121993081004	Widiarto, SE. MM. 196212141986031009	Drajad Rusdiyono 196509091987031010	FX. Slamet Priyadi 196302221993081001	Mukti Purnomo, S.IP. 197508162005011008	-	Sumarningsih 196309182007012008 Eko Prasetyadi 197310292008011006	7
7	Wonolopo	Nujuladin Anto, A.Md. 196103151986011004	-	Solekah 196212101990032003	-	Agung Purnomo, A.Md. 196311231992031007	Muzamil 196407071992031008	P.E. Sri Kunthi, HP,SH. 196506141988032007 Sri Hartatik 197010042007012015	6
8	Mijen	Bambang Sugiarto, S.Sos. 195911081984031006	Iriyanto 196405181990031005	Marni 196402021989092001	Jiyarti 196809151993032007	-	-	-	4

N O	KELURAHAN	LURAH	SEKLUR	KASI KESOS	KASI PEMERINTAHAN	KASI PEMBANGUNAN	KASI TRANTIBUM	STAF	JUMLAH
9	Jatibarang	Slamet, SE. 196004141990031006	Slamet Sugiharto 196303061990011002	-	Samudi 195907011993111001	-	Ahmad 196407251993031004	-	4
10	Kedungpane	Bambang Sulistyawan, SH 196203231986031025	-	-	Ika Dyah K. SE. 198107022010012002	Sugeng Eko Nugroho 196207241986031009	Subiyono 195810131985111001	Prayitna 196308191987091001 Juwiwati 196605122007012019	6
11	Ngadirgo	Karyoso, SH. 196405111990031005	Marhaeni Budi Utami 196309301985032011	Siti Muniroh 196411301993032007	-	-	Asikin 196408041994031008	Nur Rohmat 196406302008011002	5
12	Wonoplumbon	Sumardi, SH. 196005111985031015	Nursiyanto 196004011986061001	-	Junaidi 195909121993031002	-	-	Kusmiyati, SH. 196907212007012005	4
13	Jatisari	Mujiyono 195906031985111001	Agus Santoso, SE, MM 196709281988031002	Hardiatun, BA. 195904031986032006	Bambang Hadi S. S.IP. 196204271986031012	Ramelan 197011251992031007	Sri Mulyono 196201141993031009	Suharmi, SE. 197003052009012002	7
14	Pesantren	Agus Santoso, SE. 196207241984031004	Tarsin 195904101982081001	-	Suyanto 195911151991031006	-	-	-	3

Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Mijen dengan daerah/Kabupaten Kota dapat dilihat dalam gambar peta dibawah ini.

GAMBAR 2
PETA KECAMATAN MIJEN



2.2. Sumber Daya Kecamatan Mijen

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Kecamatan Mijen dalam menjalankan tugas dan fungsinya, didukung oleh 93 pegawai yang terdiri dari 92 PNS dan 1 CPNS. Berdasarkan eselon jabatan, pegawai di lingkungan Kecamatan Mijen dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2
Pegawai Lingkungan Kecamatan Mijen
Berdasarkan Eselon Jabatan
Per 1 Agustus 2016

No	Kecamatan/Kelurahan	IIIa	IIIb	IVa	IVb	JUMLAH
1	Kecamatan	1	1	5	3	10
2	Cangkiran	-	-	1	3	4
3	Bubakan	-	-	1	2	3
4	Karangmalang	-	-	1	4	5
5	Polaman	-	-	1	4	5
6	Purwosari	-	-	1	2	3
7	Tambangan	-	-	1	4	5
8	Wonolopo	-	-	1	3	5
9	Mijen	-	-	1	3	4
10	Jatibarang	-	-	1	3	4
11	Kedungpane	-	-	1	3	5
12	Ngadirgo	-	-	1	3	4
13	Wonoplumbon	-	-	1	2	3
14	Jatisari	-	-	1	5	6
15	Pesantren	-	-	1	2	3
	Jumlah	1	1	19	48	67

Menurut golongan, pegawai di lingkungan Kecamatan Mijen dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3
Pegawai Lingkungan Kecamatan Mijen
Berdasarkan Golongan
Per 1 Agustus 2016

No	Kecamatan/Kelurahan	IV	III	II	I	JUMLAH
1	Kecamatan	2	14	6	-	21
2	Cangkiran	-	4	2	-	6
3	Bubakan	-	3	-	-	3
4	Karangmalang	-	6	-	-	6
5	Polaman	-	6	-	-	6
6	Purwosari	-	3	2	-	5
7	Tambangan	-	5	2	-	7
8	Wonolopo	-	6	-	-	6
9	Mijen	-	4	-	-	4
10	Jatibarang	-	4	-	-	4
11	Kedungpane	-	5	1	-	6
12	Ngadirgo	-	4	1	-	5
13	Wonoplumbon	-	4	-	-	4
14	Jatisari	-	7	-	-	7
15	Pesantren	-	3	-	-	3
	Jumlah	2	77	16	-	93

Sedangkan menurut jenis kelamin, pegawai di lingkungan Kecamatan Mijen dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4
Pegawai Lingkungan Kecamatan Mijen
Berdasarkan Jenis Kelamin
Per 1 Agustus 2016

No	Kecamatan/Kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Kecamatan	10	11	21
2	Cangkiran	5	1	6
3	Bubakan	2	1	3
4	Karangmalang	2	4	6
5	Polaman	6	-	6
6	Purwosari	4	1	5
7	Tambangan	6	1	7
8	Wonolopo	3	3	6
9	Mijen	2	2	4
10	Jatibarang	4	-	4
11	Kedungpane	4	2	6
12	Ngadirgo	3	2	5
13	Wonoplumbon	3	1	4
14	Jatisari	5	2	7
15	Pesantren	3	-	3
	Jumlah	62	31	93

Jika dilihat dari tingkat pendidikan, pegawai di lingkungan Kecamatan Mijen tampak dalam tabel berikut ini:

Tabel 5
Pegawai Lingkungan Kecamatan Mijen
Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Per 1 Agustus 2016

No	Kecamatan/Kelurahan	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	JUMLAH
1	Kecamatan	2	10	1	7	-	1	21
2	Cangkiran	-	2	-	4	-	-	6
3	Bubakan	-	2	-	1	-	-	3
4	Karangmalang	-	2	-	4	-	-	6
5	Polaman	-	2	-	4	-	-	6
6	Purwosari	-	3	-	2	-	-	5
7	Tambangan	1	2	-	4	-	-	7
8	Wonolopo	-	1	2	3	-	-	6
9	Mijen	-	1	-	3	-	-	4
10	Jatibarang	-	1	-	3	-	-	4
11	Kedungpane	-	2	1	3	-	-	6
12	Ngadirgo	-	1	-	3	-	1	4
13	Wonoplumbon	-	2	-	2	-	-	4
14	Jatisari	1	2	1	3	-	-	7
15	Pesantren	-	1	-	2	-	-	3
	Jumlah	4	34	5	49	-	2	93

2.2.2. Sumber Daya Alam

Kecamatan Mijen adalah kecamatan dengan wilayah terluas di lingkungan Pemerintah Kota Semarang yang mempunyai luas 5.873,992 Ha. Kecamatan Mijen terbagi dalam 14 kelurahan, dengan luas wilayah masing-masing kelurahan dan jumlah RT dan RW, yang tampak dalam tabel berikut ini:

TABEL 6
LUAS WILAYAH KELURAHAN DAN JUMLAH RT RW
KECAMATAN MIJEN
PER 31 DESEMBER 2015

NO	KELURAHAN	LUAS WILAYAH (HA)	JUMLAH RW	JUMLAH RT
1	Cangkiran	275,650	8	40
2	Bubakan	257,964	3	11
3	Karangmalang	202,805	3	12
4	Polaman	160,875	3	9
5	Purwosari	466,820	5	19
6	Tambangan	257,925	4	13
7	Wonolopo	403,815	10	45
8	Mijen	473,891	7	32
9	Jatibarang	231,753	4	15
10	Kedungpane	583,061	6	36
11	Ngadirgo	490,650	6	27
12	Wonoplumbon	1.000,926	4	25
13	Jatisari	221,216	13	106
14	Pesantren	805,245	3	12
	JUMLAH	5.873,992	79	402

Kecamatan Mijen merupakan kecamatan yang terletak di bagian barat kota Semarang berada di ketinggian 228 dipermukaan air dengan suhu rata-rata antara 26-30 derajat celcius merupakan daerah berkembang yang sangat strategis dan sangat potensial untuk dikembangkan sebagai wilayah perdagangan dan wisata di sektor barat dengan berbagai potensi yang dimiliki.

Kecamatan Mijen juga mempunyai berbagai program unggulan diantaranya penyelenggaraan Festival Durian, Festival Kuda Lumping yang memang perlu dilestarikan keberadaannya sebagai cagar budaya yang sekarang ini semakin langka.

2.2.3. Sarana dan Prasarana Aparatur

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, Kecamatan Mijen dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan yang tampak dalam tabel berikut ini:

Tabel 7
Daftar Aset Kecamatan Mijen
Per 31 Desember 2015

NO	ASET	JUMLAH
1	Kendaraan Dinas Roda 4	1
2	Kendaraan Operasional Roda 2	15
3	Kendaraan Operasional Roda 3	21
4	Komputer PC	25
5	Laptop	20
6	LCD	16
7	Printer	9
7	Mesin Ketik Elektronik	1
8	Mesin Ketik Manual	2
9	Mesin Faksimili	2

2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Mijen

Dalam melaksanakan tugasnya Kecamatan Mijen mengacu pada tugas dan fungsi yang telah ditetapkan dan dilaksanakan menurut kedudukan masing-masing dalam struktur organisasi yang ada.

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun, hasil kinerja yang telah dilakukan Kecamatan Mijen dalam pelaksanaan program dan kegiatan tampak dalam tabel berikut ini:

TABEL 8
REALISASI RENSTRA 2011-2015
SKPD KECAMATAN MIJEN

	PROGRAM	TAHUN 1 (2011)			TAHUN 2 (2012)			TAHUN 3 (2013)			TAHUN 4 (2014)			TAHUN 5 (2015)		
		ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	%	Rp	Rp	%	Rp	Rp	%	Rp	Rp	%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	299,541,000	265,881,027	88.76	307,029,525	316,104,338	102.96	314,705,264	337,061,903	107.10	322,572,296	307,462,774	95.32	330,637,217	386,340,589	116.85
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	503,525,000	490,456,500	97.40	516,113,125	244,387,500	47.35	529,015,954	266,591,500	50.39	542,241,353	1,865,373,400	344.01	555,797,387	1,003,484,949	180.55
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	27,712,000	27,702,000	99.96	28,404,800	35,482,500	124.92	29,114,920	37,049,000	127.25	29,842,793	72,671,000	243.51	30,588,863	123,612,000	404.11
4	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	60,400,000	49,500,000	81.95	61,910,000	57,100,000	92.23	63,457,750	57,144,000	90.05	65,044,194	89,222,250	137.17	66,670,299	150,081,000	225.11
5	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan	7,500,000	7,500,000	100.00	7,687,500	14,000,000	182.11	7,879,688	23,000,000	291.89	8,076,680	13,000,000	160.96	8,278,597	62,870,000	759.43
6	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	-	99,248,000													
7	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	37,200,000	37,200,000	100.00	38,130,000	48,450,000	127.07	39,083,250	392,460,000	1,004.2	40,060,331	953,850,000	2,381.03	41,061,840	1,363,195,000	3,319.86
8	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan	308,400,000	298,363,000	96.75	316,110,000	1,710,454,000	541.09	324,012,752	2,506,227,500	773.50	332,113,068	5,697,797,000	1,715.62	343,511,958	7,678,764,100	2,235.37
9	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah					17,256,250			55,523,250			118,027,500			210,179,500	
10	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH								76,958,000			34,000,000			123,335,100	
	JUMLAH	1,244,778,000	1,275,850,527		1,275,384,950	2,443,234,588		1,307,269,578	3,752,015,153		1,339,950,715	9,151,403,924		1,376,546,161	11,101,862,238	

Dari tabel diatas terlihat bahwa dalam Renstra tahun 2010-2015 ada beberapa program yang di dalamnya ada kegiatan yang tidak terakomodir di dalam dokumen renstra, tetapi pada pelaksanaannya terakomodir pada DPA. Hal ini karena adanya kebijakan dari Pemerintah Kota.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Mijen

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan, para aparatur kecamatan bekerjasama untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan bersama, yang pada prosesnya mempunyai peluang sekaligus tantangan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja. Untuk menganalisis tantangan dan peluang yang ada di Kecamatan Mijen, kami menggunakan metode Analisa SWOT. Dalam analisa SWOT, meliputi lingkungan internal yang terdiri dari *Strength* (Kekuatan) dan *Weakness* (Kelemahan), dan lingkungan eksternal yang meliputi *Opportunity* (Peluang) dan *Threats* (Ancaman). Untuk lebih jelasnya, akan dibahas secara menyeluruh sebagai berikut:

2.4.1. Faktor Internal

1. Kekuatan (*Strength*)

- a. Adanya kebijakan Pemerintah Kota Semarang yang menjadi dasar pelaksanaan tugas dan wewenang kecamatan, yaitu:
 - Peraturan Walikota Semarang Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kecamatan Kota Semarang.

- Peraturan Walikota Semarang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 34 Tahun 2009 Tentang Pendelegasian Sebagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Walikota Kepada Camat Kota Semarang.
- b. Luas wilayah Kecamatan Mijen yang masih bisa dikembangkan.
- c. Sumber daya alam yang mempunyai berbagai potensi, diantaranya pertanian (baik buah, umbi-umbian, maupun padi), perikanan air tawar (pemancingan dan rumah makan), perkebunan anggrek, desa wisata, dan lain-lain.
- d. Adanya kelompok – kelompok kesenian tradisional seperti Kuda Lumping, Laes dan lain-lain.

2. Kelemahan (*Weaknesses*)

- a. Jumlah SDM yang tidak seimbang dengan luas wilayah Kecamatan Mijen.
- b. Kualitas SDM yang kurang memadai dengan kebutuhan saat ini.
- c. Sarana dan prasarana yang masih terbatas.

2.4.2. Faktor Eksternal

1. Peluang (*Opportunities*)

- a. Tuntutan implementasi *Good Governance* merupakan peluang bagi Kecamatan Mijen untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan pada masyarakat.
 - b. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.
 - c. Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program dan kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Mijen merupakan peluang untuk melibatkan pihak swasta dalam tiap kegiatan untuk mendukung program pembangunan.
2. Ancaman (*Threats*)
- a. Menurunnya kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.
 - b. Masing-masing SKPD masih bekerja secara parsial (bekerja sendiri).

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Mijen

Berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Mijen dapat diidentifikasi permasalahan yang ada di wilayah Kecamatan Mijen, yang dapat dilihat dari matrik berikut ini:

TABEL 9

Identifikasi Permasalahan Kecamatan Mijen

NO	PERMASALAHAN	AKAR PERMASALAHAN
1	2	3
1	Belum seluruh lapisan masyarakat mendapat akses ke pelayanan kesehatan yang bermutu.	1. Belum optimalnya budaya perilaku hidup sehat pada masyarakat. 2. Masih perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Kesehatan.
2.	Tingginya tingkat pengangguran terbuka.	1. Peningkatan kualitas dan kompetensi seluruh tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja masih perlu dioptimalkan. 2. Masih diperlukan peningkatan minat kewirausahaan.
3.	Masih belum tuntasnya pengentasan kemiskinan.	Jumlah bantuan sosial sarpras / pemenuhan kebutuhan sosial dasar (sanitasi, air minum, RTLH) masih perlu ditingkatkan.
4.	Perlu peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan.	1. Peran dan fungsi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan masih perlu dioptimalkan. 2. Koordinasi lintas sektor untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat masih perlu dioptimalkan. 3. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan masih perlu ditingkatkan.
5.	Perlu peningkatan disiplin aparatur.	1. Kualitas mental dan pola pikir aparatur perlu lebih ditingkatkan. 2. Jumlah, kapabilitas, kapasitas dan

NO	PERMASALAHAN	AKAR PERMASALAHAN
		kompetensi aparatur masih perlu peningkatan.
6.	Masih terdapat sarana prasarana pelayanan publik yang belum sesuai standar.	1. Kinerja aparatur pelayan masyarakat masih perlu ditingkatkan. 2. Peningkatan sarana prasarana pelayanan. 3. Penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan perlu lebih ditingkatkan. 4. Penerapan SOP pelayanan masih belum berjalan dengan optimal.
7.	Masih tingginya jumlah pelanggaran Perda.	1. Kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap Perda perlu ditingkatkan. 2. Menurunnya penerapan nilai-nilai kebangsaan/ nasionalisme, gotong royong, budi pekerti, dan kesetiakawanan sosial di kalangan masyarakat.
8.	Masih terjadinya genangan banjir dan rob.	1. Masih ada saluran dan gorong-gorong yang belum berfungsi optimal. 2. Saluran drainase belum terintegrasi secara menyeluruh.
9.	Belum optimalnya pengembangan sistem transportasi terpadu.	Jaringan jalan belum terbangun secara menyeluruh.
10.	Belum seluruh Rumah Tangga memiliki sanitasi yang baik.	Penyediaan Prasarana Sarana Umum (PSU) lingkungan perumahan dan permukiman masih perlu ditingkatkan.
11.	Kurangnya penanganan tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan.	1. Pelayanan pengelolaan persampahan masih perlu ditingkatkan. 2. Peran serta dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan masih perlu dioptimalkan.
12.	Kontribusi kategori-kategori pada sektor perdagangan dan jasa-jasa perlu dioptimalkan.	Belum optimalnya upaya pembinaan dan pengendalian pedagang informal di ruang publik.
13.	Produk-produk unggulan daerah belum dikembangkan dengan maksimal.	1. Belum optimalnya pengembangan industri yang berwawasan lingkungan. 2. Pola kemitraan antara UMKM dengan usaha besar belum optimal.
14.	Belum optimalnya pengembangan destinasi wisata.	Belum optimalnya keikutsertaan swasta dan masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

Visi Walikota dan Wakil Walikota Semarang terpilih yang telah ditetapkan yaitu ***Semarang Kota Perdagangan dan Jasa yang HEBAT Menuju Masyarakat Semakin Sejahtera***. Makna dari visi tersebut adalah Semarang sebagai kota metropolitan yang berwawasan lingkungan akan menjadi kota yang handal dan maju dalam perdagangan dan jasa, dengan dukungan infrastruktur yang memadai serta tetap menjadi daerah yang kondusif untuk meningkatkan kesejahteraan warganya dengan dukungan pengembangan bidang politik, keamanan, sosial, ekonomi dan budaya.

Dari definisi HEBAT dikandung pemahaman bahwa Visi tersebut ingin mewujudkan kondisi masyarakat yang semakin sejahtera dalam rangka mencapai keunggulan dan kemuliaan serta kondisi perkotaan yang kondusif dan modern dengan tetap memperhatikan lingkungan yang berkelanjutan demi kemajuan perdagangan dan jasa.

Dalam rangka mewujudkan Visi ***Semarang Kota Perdagangan dan Jasa yang HEBAT Menuju Masyarakat Semakin Sejahtera*** diatas, dijabarkan dalam 4 (empat) misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berkualitas.

2. Mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk meningkatkan pelayanan publik.
3. Mewujudkan kota metropolitan yang dinamis dan berwawasan lingkungan.
4. Memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim usaha yang kondusif.

Pesan mendasar dari misi tersebut diatas utamanya adalah untuk membuat masyarakat semakin sejahtera, secara singkat dimaknai sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan publik, pengembangan kehidupan berdemokrasi, pemerataan dan keadilan di daerah.

Dalam kerangka mewujudkan Visi dan Misi tersebut agar lebih mudah dioperasionalkan, maka dilakukan dengan mengembangkan semangat kegotongroyongan, dengan slogan **“Bergerak Bersama Membangun Semarang”**. Yang mana slogan ini diartikan sebagai satu sikap yang terwujud dalam bentuk inisiatif dan penuh semangat untuk menyumbangsihkan tenaganya dalam rangka membangun kota. Melalui pernyataan ini akan timbul sikap kepeloporan, sinergi dan kolaborasi untuk menjaga kota dan melakukan inovasi serta kreatifitas dalam membangun kota dengan tidak meninggalkan budaya dan karakter lokal.

Pelaksanaan Visi dan Misi serta strategi ini senantiasa tetap berpedoman pada kepentingan keterpaduan dengan Visi dan Misi Pemerintah Pusat dan Provinsi. Selanjutnya Visi dan Misi dijabarkan dalam sasaran serta program dan kegiatan prioritas unggulan sebagai arah pelaksanaan pembangunan selama lima tahun ke depan. Adapun sasaran dan program tersebut sebagai berikut:

Misi 1 : Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berkualitas.

Dengan program prioritas menyangkut karakter, kebudayaan, pendidikan, kesehatan, gender, pemuda dan olah raga serta kesejahteraan masyarakat, terdiri dari program berikut ini:

1. *Program penguatan karakter*, dengan kegiatan unggulan Pengembangan Nasionalisme Substansial, Pengembangan Budaya Toleransi Dan Tertib, Muatan Lokal Pendidikan Karakter, Gerakan Cinta Kota, Guyub Bareng Komunitas, Gotong Royong Tematik.
2. *Program kebudayaan*, yang difokuskan pada kegiatan unggulan Pengembangan Kawasan Kota Lama Menuju Warisan Dunia Tahun 2020 (UNESCO), Festival Kesenian Semarang Terpadu, Semarang Heritage Tour, Festival Komunitas Budaya, Pengembangan Budaya Kearifan Lokal.
3. *Program Peningkatan Kualitas Pendidikan*, yang difokuskan pada kegiatan unggulan Peningkatan Pendanaan Pendampingan BOS Dikdas, Optimalisasi Pelaksanaan Wajib Belajar 12 tahun, Peningkatan Fasilitas dan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar (SD/SMP), Penyelenggaraan Semarang Knowledge Sharing (SKS).
4. *Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat*, yang difokuskan pada kegiatan unggulan Pembangunan Gizi Center di setiap Puskesmas, Spesifikasi Pelayanan Puskesmas (rebranding Puskesmas), Unit Reaksi Cepat Layanan Kesehatan, Pelayanan Kesehatan Terpadu pada unit-unit layanan kesehatan.

5. *Program Pemberdayaan Perempuan*, yang difokuskan pada kegiatan unggulan Peningkatan Kualitas SDM Perempuan, Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG), Peningkatan Kualitas Perlindungan Perempuan, Peningkatan Peran Perempuan pada lembaga di tingkat Kelurahan, Pengawasan terhadap perekrutan Calon Tenaga Kerja Perempuan.
6. *Program Kepemudaan dan Olah Raga*, yang difokuskan pada kegiatan unggulan Penyediaan Building Learning Center (BLC) di tiap Kecamatan, Pembangunan Sport and Convention Center standard International, Penyediaan Dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga di tiap Kecamatan.
7. *Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial*, yang difokuskan pada kegiatan unggulan Pembangunan Crisis Center untuk tindak kekerasan perempuan dan anak, Pengentasan Kemiskinan Terpadu, Pekan CSR (Company Social Responsibility), Penyediaan Daycare Center di lingkungan permukiman, Pembangunan Taman Layak Anak di tiap Kecamatan.

Misi 2 : Mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk meningkatkan pelayanan publik.

Dengan program prioritas menyangkut transparansi dan akuntabilitas, manajemen pemerintahan dan pelayanan public, yang terdiri dari program berikut ini:

1. *Program Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas*, yang difokuskan pada kegiatan unggulan integrasi database

perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan, pengembangan e-planning, e-budgeting dan e-monitoring.

2. *Program Manajemen Pemerintahan Unggul*, yang difokuskan pada kegiatan unggulan pembangunan dan pengembangan *cyber government* Semarang, pembangunan *monitoring & controlling room* (MCR), penyediaan teleconference dalam kegiatan pemerintahan, penataan kelembagaan menuju reformasi birokrasi, penguatan kepastian hukum, revitalisasi kantor kecamatan dan kelurahan, penyelenggaraan system remunerasi PNS, perintisan pusat pemerintahan Kota Semarang di Mijen, membangun jejaring kerjasama antar kota baik di dalam dan luar negeri.
3. *Program Pelayanan Publik*, yang difokuskan pada kegiatan unggulan optimalisasi SOP pelayanan public, *one way service* pelayanan public, pengembangan *cyber city*, administrasi di kelurahan yang terintegrasi dengan pusat data dan SKPD terkait (*Kelurahan Online Single System Report*).

Misi 3 : Mewujudkan kota metropolitan yang dinamis dan berwawasan lingkungan.

Dengan program prioritas menyangkut tata kelola infrastruktur, ruang terbuka publik, transportasi berkelanjutan, dan jejaring kerjasama, terdiri dari program berikut ini:

1. *Program Tata Kelola Infrastruktur Berkelanjutan*, yang difokuskan pada kegiatan unggulan peningkatan konektivitas dan aksesibilitas wilayah pengembangan serta kabupaten/kota lain di wilayah *hinterland*, bedah rumah tuuntas (bedah rumah

tidak layak huni secara tuntas dan menyeluruh), penataan dan pengembangan dekorasi kota melalui *Street Furniture* dan *Pedestrian Ways*, penyediaan air minum dan air bersih ke seluruh wilayah, pembangunan kampung sehat percontohan di tiap kecamatan, penyediaan lahan pemakaman baru, pembangunan jalan-jalan baru seperti middle ring road dan outer ring road, relokasi tempat pembuangan akhir, gerakan bank sampah, normalisasi banjir kanal timur, penanganan system drainase wilayah timur dan Mangkang, pembangunan system polder dan embung skala kota, pengelolaan mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim, penanganan kawasan pemukiman kumuh di perkotaan, pembangunan kampung bahari Tambaklorok, penyediaan PJU yang hemat energy, pembangunan pasar tradisional (Johar, Karangayu, Waru), penyusunan dokumen perencanaan kota (RTRW, RDTRK dan RTBL/RTRK).

2. *Program Peningkatan Ruang Terbuka Publik*, yang difokuskan pada kegiatan unggulan peningkatan pengelolaan lahan di lingkungan permukiman perkotaan dan jalan-jalan utama, penyediaan jalur bunga di jalur pedestrian, memperbanyak public space untuk aktifitas warga, pembangunan taman-taman baru terutama di lingkungan permukiman, penyediaan sarana dan prasarana penataan taman, pembangunan bumi perkemahan di kawasan Greenbelt Dam Jatibarang.
3. *Program Pengembangan Transportasi Berkelanjutan*, yang difokuskan pada kegiatan unggulan penyediaan transportasi massal ramah lingkungan (BRT, Monorel/MRT), integrasi dan

interkoneksi antar moda transportasi di terminal, pelabuhan, stasiun kereta api dan bandara, pengembangan moda transportasi regional, pembangunan terminal barang.

4. *Program Jejaring Kerjasama Dalam Penyediaan Infrastruktur*, yang difokouskan pada kegiatan unggulan pengembangan alternative pembiayaan infrastruktur, pengembangan system penyediaan air minum regional, pengembangan TPA regional, revitalisasi sungai dan kali lintas wilayah.

Misi 4 : Memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim usaha yang kondusif.

Dengan program prioritas menyangkut daya saing, ekonomi local, produksi kreatif yang terdiri dari program berikut ini:

1. *Program Akselerasi Daya Saing*, yang difokuskan pada kegiatan unggulan layanan perijinan terpadu, pembangunan *eco techno park*, pembangunan pusat pertumbuhan baru (*growth pole*), pengembangan kepariwisataan terpadu.
2. *Program Pemberdayaan Ekonomi Lokal*, yang difokuskan pada kegiatan unggulan pembentukan lembaga pendanaan UMKM (*Semarang Microfinance*), pemberdayaan ekonomi rumah tangga, pengembangan industry kreatif berbasis potensi lokal (*one product one village*), temu bisnis UMKM dan pengusaha, pengembangan ekonomi pesisir pantai.
3. *Program Produksi Kreatif*, yang difokuskan pada kegiatan unggulan pembangunan pusat inkubasi bisnis bagi wirausaha baru dan sedang berkembang, pembangunan sentra industry kreatif, pekan produk kreatif, pengembangan *cyber marketing*.

3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.3.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 diatur dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang disusun untuk mengarahkan pembangunan dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan.

Rencana Tata Ruang Wilayah yang disingkat RTRW Kota Semarang adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011, rencana struktur ruang meliputi:

1. Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan, yaitu meliputi:
 - Rencana Pembagian Wilayah Kota (BWK)
 - Rencana Penetapan Pusat Pelayanan
2. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan, yaitu meliputi:
 - Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi
 - Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Energi
 - Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi
 - Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Sumber Daya Air

- Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Infrastruktur Perkotaan
- Rencana Pengembangan Sistem Sarana dan Prasarana Perkotaan Lainnya.

Dalam rencana pembagian wilayah kota (BWK), Kecamatan Mijen adalah BWK IX dengan luas kurang lebih 6.213 hektar, dengan rencana pengembangan fungsi utama sebagai kantor pelayanan publik.

Sedangkan rencana penetapan pusat pelayanan meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Pusat Pelayanan Kota, berfungsi sebagai pusat pelayanan pemerintahan kota dan pusat kegiatan perdagangan dan jasa.
2. Sub Pusat Pelayanan Kota, dilengkapi dengan sarana lingkungan perkotaan skala pelayanan BWK yang meliputi sarana perdagangan dan jasa, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan dan sarana pelayanan umum. Rencana lokasi pengembangan sub pusat pelayanan kota di Kecamatan Mijen adalah Kelurahan Mijen, Kelurahan Jatibarang dan Kelurahan Wonolopo.
3. Pusat Lingkungan, dilengkapi dengan sarana lingkungan perkotaan skala pelayanan BWK yang meliputi sarana perdagangan dan jasa, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan dan sarana pelayanan umum. Rencana lokasi pengembangan pusat lingkungan di Kecamatan Mijen yaitu:
 - Pusat Lingkungan 1 di Kelurahan Kedungpane dengan daerah pelayanan Kelurahan Jatibarang dan Kelurahan Pesantren;

- Pusat Lingkungan 2 terdapat di Kelurahan Mijen dengan daerah pelayanan Kelurahan Wonolopo, Kelurahan Ngadirgo dan Kelurahan Wonoplumbon;
- Pusat Lingkungan 3 terdapat di Kelurahan Cangkiran dengan daerah pelayanan Kelurahan Bubakan, Kelurahan Tambangan dan Kelurahan Jatisari;
- Pusat Lingkungan 4 terdapat di Kelurahan Purwosari dengan daerah pelayanan Kelurahan Polaman dan Kelurahan Karangmalang.

3.3.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pengelolaan lingkungan dalam pembangunan membutuhkan pendekatan perencanaan yang integrative, dimana komponen pendukung pengelolaan lingkungan memiliki sifat dan ciri yang berbeda. Adanya keanekaragaman sifat dan ciri tersebut, membutuhkan pola pendekatan yang holistik, artinya suatu cara pandang masalah pembangunan dari berbagai disiplin ilmu yang terpadu dan proposional akan mampu memecahkan permasalahan tersebut.

Dalam Undang - Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Dalam UUPPLH pasal 65 ayat 2 dan pasal 70, dijelaskan tentang perlunya pelibatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, baik yang bersifat pasif maupun aktif. Oleh karena itu, tugas pelaksanaan pengelolaan dan perlindungan lingkungan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan jajarannya, tetapi dimungkinkan kerjasama dengan berbagai pihak seperti masyarakat maupun perorangan, industri dan kalangan akademis.

Upaya menumbuhkembangkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat ini, partisipasi masyarakat mutlak diperlukan. Pengembangan partisipasi ini tidak tumbuh dengan sendirinya, melainkan didorong melalui program berkelanjutan. Seperti pengembangan kapasitas, pemberian isentif, penciptaan iklim yang kondusif dan disertai pemberian ruang gerak dan akses yang memadai. Pengembangan kapasitas ini juga harus selaras dengan amanat Undang – Undang Sumber Daya Air yang menekankan perlunya tahap perencanaan, implementasi hingga evaluasi dalam setiap upaya konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air.

Sebagai contoh di Kelurahan Purwosari Kecamatan Mijen terdapat penambangan liar non-mineral yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Padahal kelurahan ini berbatasan langsung dengan Kelurahan Jatibarang di sebelah selatan. Jarak kelurahan Purwosari ini berdekatan dengan kawasan Waduk Jatibarang yakni kurang dari 4 km. Masyarakat mengambil batuan dari dalam sungai dan mengumpulkannya di lokasi pengumpulan batu yang dekat dengan sungai. Di kelurahan ini juga ditemukan sejumlah lahan

kritis. Bahkan oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Semarang, kelurahan ini dipilih menjadi kelurahan yang perlu mendapat penanganan lahan kritis secara serius di Kota Semarang. Persoalan tambang liar non-mineral dan lahan kritis di kelurahan ini, serta berbagai persoalan di atas. Apabila tidak diantisipasi sejak dini akan menimbulkan permasalahan baru yang dapat mengancam keberlangsungan waduk. Sehingga salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan pelibatan peran aktif masyarakat. Terlebih karena mereka sebagai penerima dampak utama dari pembangunan tersebut.

3.4. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis adalah masalah-masalah strategis yg dikedepankan untuk ditanggapi dan ditindaklanjuti penyelesaiannya. Dalam proses penyusunan Renstra, penentuan isu-isu strategis sangat penting untuk menentukan langkah-langkah yang akan diwujudkan dalam program dan kegiatan agar tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga tujuan pembangunan untuk mensejahterakan masyarakat baik secara fisik berupa pembangunan sarana dan prasarana lingkungan, maupun non fisik berupa pembangunan manusia, dapat tercapai dengan maksimal.

Variabel penyebab yang mempengaruhi permasalahan dan penentuan isu strategis, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL 10
Identifikasi Masalah, Variabel Penyebab Yang Mempengaruhi
Permasalahan dan Isu Strategis

NO	PERMASALAHAN	VARIABEL MASALAH	ISU STRATEGIS
1	2	3	4
1.	Masih tingginya Angka Demam Berdarah Dengue (DBD).	Kesadaran Masyarakat terhadap Perilaku Hidup Sehat dan Kesehatan Lingkungan.	Peningkatan pelayanan kesehatan.
2.	Masih terdapat kematian ibu.		
3.	Masih terdapat kematian bayi.		
4.	Belum optimalnya upaya peningkatan kualitas dan pemeliharaan jalan lingkungan.	Ketersediaan Jaringan jalan dan sarana prarana pendukung yang berkualitas.	Peningkatan infrastruktur berkelanjutan.
5.	Belum optimalnya upaya peningkatan dan pemeliharaan saluran drainase.	Ketersediaan Jaringan drainase dan sarana prarana pendukung yang berkualitas.	
6.	Jaringan drainase belum terhubung dengan optimal.		
7.	Masih adanya titik-titik genangan banjir dan rob.	Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pengendalian rob dan banjir.	Penanganan rob dan banjir.
8.	Masih adanya bangunan liar.	Tingkat pengendalian tata ruang.	Peningkatan tata ruang dan kualitas lingkungan hidup.
9.	Masih adanya ketidaksesuaian peruntukan tata ruang.		
10.	Kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan belum optimal.	Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).	
11.	Belum optimalnya upaya peningkatan pelayanan pengelolaan air minum dan air limbah.	Tingkat Pelayanan Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah.	Peningkatan pelayanan publik.
12.	Belum optimalnya upaya pengurangan luasan permukiman kumuh.	Adanya Kawasan-kawasan Kumuh.	
13.	Masih kurangnya ketersediaan perumahan yang layak dan terjangkau terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).	Ketersediaan Perumahan yang Layak dan Terjangkau bagi MBR.	Peningkatan kesejahteraan masyarakat.
14.	Belum optimalnya penanganan kawasan kumuh	Kualitas lingkungan perumahan dan permukiman	
15.	Belum optimalnya penyediaan Prasarana Sarana Umum (PSU) lingkungan perumahan dan permukiman.	Regulasi penyediaan PSU lingkungan perumahan dan permukiman.	Peningkatan infrastruktur berkelanjutan.
16.	Kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap Perda perlu ditingkatkan.	Kesadaran dan pemahaman Masyarakat terhadap Peraturan perundang-undangan.	Peningkatan pelayanan publik.
17.	Masih tingginya jumlah pelanggaran Perda.	Ketersediaan sarana prasarana, SDM dan sistem pengelolaan keamanan dan ketertiban masyarakat.	
18.	Masih maraknya penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, psikotropika, dan zat adiktif lainnya	Mental, moral dan budi pekerti.	

NO	PERMASALAHAN	VARIABEL MASALAH	ISU STRATEGIS
	dikalangan pelajar, mahasiswa, pekerja serta masyarakat umum lainnya.		
19	Pengentasan kemiskinan belum tuntas dan penanganannya belum optimal.	Integrasi program penanggulangan Kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran.
20	Masih cukup tingginya tingkat pengangguran terbuka.	Tingkat Pengangguran.	Peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat.
21	Belum optimalnya upaya peran serta dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan daerah.	Tingkat partisipasi Perempuan dalam Pembangunan.	
22	Terbatasnya fungsi dan peran kelembagaan perempuan masyarakat dalam pembangunan.	Tingkat partisipasi Perempuan dalam Pembangunan.	
23	Masih munculnya konflik kepentingan pertanahan.	Status kepemilikan hak atas tanah.	
24	Masih tingginya tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan.	Tingkat permasalahan Lingkungan hidup.	Peningkatan tata ruang dan kualitas lingkungan hidup.
25	Belum optimalnya pelayanan pengelolaan persampahan.	Tingkat Pelayanan Pengelolaan Persampahan.	
26	Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dan pembangunan berspektif gender.	Tingkat kesadaran masyarakat dalam Pembangunan	Peningkatan kesejahteraan sosial.
27	Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan.		
28	Menurunnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan		
29	Belum optimalnya upaya pemberdayaan kapasitas dan potensi ekonomi keluarga untuk mendorong peningkatan kesejahteraan.	Peningkatan kapasitas warga miskin.	Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran.
30	Masih terbatasnya akses keluarga miskin terhadap sistem ekonomi formal.	Kapasitas keluarga miskin.	
31	Belum optimalnya penggunaan data miskin keluarga sebagai sasaran program.	Kapasitas dan Potensi Ekonomi Keluarga.	Peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat.
32	Masih terdapat aplikasi pelayanan publik berbasis online yang masih belum terintegrasi.	Tingkat Pelayanan Komunikasi dan Informatika.	Peningkatan pelayanan publik.
33	Pelayanan kepada masyarakat terkait perkembangan dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi perlu ditingkatkan.		
34	Belum memadainya kemampuan SDM dan kelembagaan UMKM.	Tingkat pengelolaan KUMKM yang terintegrasi.	Peningkatan Ekonomi dan daya saing.
35	Masih rendahnya peranserta pemuda dalam pembangunan.	Peran serta Pemuda dalam Pembangunan.	Peningkatan Kesejahteraan Sosial.
36	Belum optimalnya keikutsertaan swasta dan masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan.	Pengelolaan dan Daya tarik wisata.	Peningkatan Ekonomi dan daya saing.
37	Upaya pembinaan dan pengendalian pedagang informal di ruang publik	Pengelolaan sarana prasarana perdagangan.	

NO	PERMASALAHAN	VARIABEL MASALAH	ISU STRATEGIS
	masih perlu ditingkatkan.		
38	Belum optimalnya pengembangan industri yang berwawasan lingkungan.	Tingkat pengelolaan IKM dan Industri Kreatif.	
39	Belum memadainya kualitas dan kapasitas SDM dan kelembagaan IKM.	Kemitraan usaha IKM dan Industri Kreatif.	
40	Penyerapan aspirasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan belum optimal.	Konsistensi proses / mekanisme perencanaan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi.
41	Kualitas dokumen perencanaan, evaluasi, laporan kinerja dan keuangan Perangkat Daerah belum optimal.	Konsistensi dokumen perencanaan dan penganggaran.	
42	Belum optimalnya upaya peningkatan sistem pengelolaan dan pelaporan keuangan dan aset daerah.	Kualitas Sumberdaya Aparatur.	
43	Belum optimalnya pengelolaan aset.	Sistem tata kelola pemerintahan.	
44	Kurang optimalnya kinerja aparatur terhadap pelayanan masyarakat.	Kompetensi, kapasitas dan kapabilitas aparatur daerah.	
45	Disiplin aparatur masih perlu ditingkatkan.		
46	Kualitas mental dan pola pikir aparatur perlu ditingkatkan.		
47	Tingkat pemahaman hukum masyarakat dan aparatur masih perlu ditingkatkan.		
48	Jumlah personil masih belum mencukupi dan kemampuan SDM masih perlu ditingkatkan.	Tingkat kesadaran bermasyarakat dan berbangsa.	Peningkatan pelayanan publik.
49	Menurunnya penerapan nilai-nilai kebangsaan/nasionalisme, gotong royong, budi pekerti, dan kesetiakawanan sosial di kalangan masyarakat.		

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Kecamatan Mijen

Tujuan dan sasaran Kecamatan Mijen sesuai dengan tugas dan fungsi kecamatan, serta strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dirumuskan dan dilihat pada matrik berikut ini:

TABEL 11
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1	2	3	4
I. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat			
Mewujudkan wilayah Kecamatan yang tentram, tertib dan nyaman.	Meningkatnya ketentraman dan kenyamanan masyarakat.	Peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga ketertiban dan kenyamanan.	Peningkatan ketentraman dan kenyamanan melalui pemberdayaan masyarakat.
II. Urusan Lingkungan Hidup			
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup perkotaan.	Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.	Pembenahan penataan wilayah Kecamatan yang berwawasan lingkungan.	Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.
III. Urusan Kesehatan			
Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.	Peningkatan Penyehatan lingkungan.
IV. Urusan Pemberdayaan Masyarakat			
Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat.	Pemberdayaan masyarakat miskin.	Penurunan jumlah keluarga miskin.
	Meningkatnya pembangunan dan kapasitas pemberdayaan masyarakat.	Pemberdayagunaan peran serta masyarakat dalam berbagai sektor pembangunan.	Peningkatan pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas dan gender.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
V. Fungsi Penunjang (Keuangan)			
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani.	1. Terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN. 2. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja. 3. Meningkatnya integritas aparatur.	Reformasi Birokrasi	1. Peningkatan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. 2. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pemerintahan yang profesional (kompetensi birokrasi).
VI. Fungsi Penunjang (Pemerintahan Umum)			
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani.	1. Terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN. 2. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja. 3. Meningkatnya integritas aparatur.	Reformasi Birokrasi	1. Peningkatan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. 2. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pemerintahan yang profesional (kompetensi birokrasi).
Meningkatkan kualitas pelayanan publik.	Terwujudnya pelayanan prima.	Peningkatan kualitas dan manajemen pelayanan publik.	Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik.
VII. Program – program Rutin			
1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani. 2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.	1. Terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN. 2. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja. 3. Meningkatnya integritas aparatur. 4. Terwujudnya pelayanan prima.	1. Reformasi Birokrasi. 2. Peningkatan kualitas dan manajemen pelayanan publik.	1. Peningkatan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. 2. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pemerintahan yang profesional (kompetensi birokrasi). 3. Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik.

BAB V

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta melihat akar permasalahan yang ada dan juga penyebabnya, maka dapat diatasi dengan kebijakan yang dituangkan dalam beberapa program dan kegiatan yang direncanakan Kecamatan Mijen untuk lima tahun periode Renstra ini.

Matrik penyelesaian masalah-masalah di Kecamatan Mijen dengan program dan kegiatan tampak pada tabel berikut ini:

TABEL 12
MATRIK PENYELESAIAN PERMASALAHAN
KECAMATAN MIJEN

Permasalahan Pokok	Akar Permasalahan	Kebijakan	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5
I. URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang tertib, tentram dan nyaman.	1. Masih terjadi pelanggaran Perda di lingkungan (seperti IMB, HO, Reklame, dll). 2. Belum semua RT melaksanakan siskamling. 3. Kuantitas dan kualitas anggota Linmas belum memadai.	Peningkatan ketentraman dan kenyamanan melalui pemberdayaan masyarakat.	Program Peningkatan Ketentraman dan Kenyamanan Lingkungan.	1. Pendampingan Penegakan Perda di Kecamatan dan Pemantauan Wilayah Rawan Tramtibus.
II. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP				
Belum optimalnya pengelolaan persampahan di Kecamatan (pengangkutan sampah dari TPS ke TPA).	1. Budaya bersih lingkungan belum mengakar di masyarakat sebagai pendukung utama terwujudnya Kota Adipura. 2. Belum terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana kebersihan lingkungan di Kecamatan dan Kelurahan.	Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan.	1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan.
				2. Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Persampahan.
			Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.	1. Koordinasi Penilaian Adipura.
III. URUSAN KESEHATAN				
Masih adanya gangguan kesehatan terhadap Ibu Melahirkan / Balita dan penyakit Demam Berdarah.	1. Budaya bersih dan sehat belum mengakar di masyarakat sebagai pendukung utama terwujudnya lingkungan/Kota Sehat. 2. Belum terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana kesehatan lingkungan di Kecamatan dan Kelurahan.	Peningkatan Penyehatan lingkungan.	Program Pengembangan Lingkungan Sehat.	Fasilitasi Forum Kota Sehat (FKK) Kecamatan/Kelurahan.

Permasalahan Pokok	Akar Permasalahan	Kebijakan	Program	Kegiatan
IV. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT				
1. Masih tingginya jumlah warga miskin di Kelurahan. 2. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan belum optimal.	1. Masih terdapat wilayah kumuh di lingkungan pemukiman warga miskin. 2. Belum optimalnya upaya pemberdayaan ekonomi mikro warga MBR.	Penurunan jumlah keluarga miskin.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan.	1. Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan (Gerbang Hebat) - Pembangunan Kp. Tematik - Pembangunan E-Warong
	1. Belum seluruh usulan Musrenbang, bisa diakomodir dalam Rencana Kerja Kecamatan. 2. Masih adanya usulan Musrenbang yang tidak memungkinkan untuk dipenuhi (termasuk kategori hibah, bansos, belanja barang/aset). 3. Belum terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana lingkungan yang memadai di Kecamatan dan Kelurahan. 4. Belum seluruh potensi dan kegiatan masyarakat tercover anggaran. 5. Menurunnya semangat gotong royong masyarakat dalam kegiatan kewilayahan/lingkungan.	Peningkatan pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas dan gender.	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan.	2. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan. 1. Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Kelurahan. 2. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan. 3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. 4. Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Hasil Musrenbang. 5. Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pembangunan Sarana Prasarana Umum. 6. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Jalan dan Jembatan. 7. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Saluran Lingkungan.

Permasalahan Pokok	Akar Permasalahan	Kebijakan	Program	Kegiatan
				8. Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Hasil Musrenbang.
V. FUNGSI PENUNJANG (KEUANGAN)				
1. Belum optimalnya pendapatan daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).	1. Masih perlunya peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).	1. Peningkatan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.	Program Peningkatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah.	1. Optimalisasi Pemungutan PBB oleh Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan.
2. Belum optimalnya pengelolaan aset daerah di Kecamatan/Kelurahan.	2. Masih perlunya peningkatan kapasitas pengelolaan aset daerah di Kecamatan/Kelurahan.	2. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pemerintahan yang profesional (kompetensi birokrasi).		2. Monitoring Pengendalian Aset Kecamatan.
VI. FUNGSI PENUNJANG (PEMERINTAHAN UMUM)				
Belum optimalnya kinerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan.	1. Masih perlunya peningkatan akuntabilitas Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan.	1. Peningkatan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.	Program Peningkatan dan Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum.	1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Kecamatan
	2. Kurangnya kompetensi SDM di Kecamatan dan Kelurahan	2. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pemerintahan yang profesional (kompetensi birokrasi).		2. Pengembangan Budaya Kerja dan Pembinaan Mental Rohani Aparatur.
Belum optimalnya pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan.	1. Sarana prasarana pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan belum seluruhnya memadai.	Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik.		1. Implementasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).
	2. Belum tersedia dan terintegrasinya data baseline yang akurat dan ter-update di seluruh Kelurahan/Kecamatan.			2. Broadband Learning Centre (BLC).

Permasalahan Pokok	Akar Permasalahan	Kebijakan	Program	Kegiatan
VII. PROGRAM – PROGRAM RUTIN				
Perlunya pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran Kecamatan dan Kelurahan secara rutin untuk keberlangsungan operasional	Kebutuhan rutin kantor Kecamatan dan Kelurahan terhadap : 1. Pembayaran rekening listrik, telpon dan air tiap bulan untuk kantor 2. Alat tulis kantor 3. Barang cetakan dan penggandaan 4. Penggantian komponen instalasi listrik / lampu penerangan kantor 5. Penyediaan makanan dan minuman untuk rapat dan jamuan tamu 6. Perjalanan dinas ke luar daerah 7. Pembayaran jasa penunjang administrasi perkantoran	1. Peningkatan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah 2. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pemerintahan yang profesional (kompetensi birokrasi) 3. Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Pembayaran Jasa Komunikasi , SDA, Listrik. 2. Penyediaan Alat Tulis Kantor. 3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan. 4. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor. 5. Penyediaan Makanan dan Minuman. 6. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah. 7. Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran.
Perlunya pemenuhan kebutuhan untuk peningkatan sarana dan prasarana kerja/operasional aparatur Kecamatan dan Kelurahan.	Kebutuhan rutin kantor Kecamatan dan Kelurahan terhadap : 1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 2. Pengadaan peralatan gedung kantor 3. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Camat dan Lurah. 4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor. 5. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional. 6. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kerja. 7. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair. 8. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor, termasuk rumah dinas dan balai Kelurahan. 9. Penyediaan jasa pemeliharaan perijinan kendaraan dinas (perpanjangan STNK).		2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.	1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor. 2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor. 3. Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Dinas. 4. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor. 5. Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas. 6. Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor. 7. Pemeliharaan rutin/berkala Mebelair. 8. Rehabilitasi sedang / berat Gedung Kantor. 9. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perijinan Kendaraan Dinas.

Permasalahan Pokok	Akar Permasalahan	Kebijakan	Program	Kegiatan
Perlunya pemenuhan kebutuhan untuk peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.	<p>Kebutuhan rutin SKPD Kecamatan untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Kecamatan. 2. Menyusun Laporan Keuangan Semesteran. 3. Menyusun Laporan Prognosis Realisasi Anggaran. 4. Menyusun Laporan Keuangan Akhir Tahun. 5. Menyusun RKA dan DPA. 6. Menyusun LkjIP. 7. Menyusun Renstra Perangkat Drh. 8. Menyusun LKPJ Perangkat Drh. 9. Menyusun Renja Perangkat Drh. 10. Menunjang Kinerja PA, KPA, PPK, Bendahara dan Bendahara Pembantu. 		3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah. 2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran. 3. Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran. 4. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun. 5. Penyusunan RKA dan DPA. 6. Penyusunan LKjIP. 7. Penyusunan Renstra Perangkat Drh. 8. Penyusunan LKPJ Perangkat Drh. 9. Penyusunan Renja Perangkat Drh. 10. Penunjang Kinerja PA, KPA, PPK, Bendahara dan Bendahara Pemb.

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, tersaji dalam tabel berikut ini:

TABEL 13
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
KECAMATAN MIJEN

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KO DE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2016)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
							2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT																		
Mewujudkan wilayah Kecamatan yang tentram, tertib dan nyaman	Meningkatnya ketentraman dan kenyamanan masyarakat	Terwujudnya lingkungan Kecamatan yang tertib, tentram dan nyaman		Program Peningkatan Ketentraman dan Kenyamanan Lingkungan	cakupan pemantauan gangguan ketentraman, ketertiban dan kenyamanan lingkungan meliputi 6 (enam) kegiatan: Pemantauan pelanggaran Perda, Pendampingan penegakan Perda, Pemantauan Siskamling, Patroli wilayah, Piket Kesiagaan, dan Siaga bencana	-	100%	13.409.000	100%	14.750.000	100%	16.225.000	100%	17.850.000	100%	19.635.000	100%	81.869.000
				1. Pendampingan Penegakan Perda di Kecamatan dan Pemantauan Wilayah Rawan Tramtibum	Adanya kegiatan Pendampingan Penegakan Perda di Kecamatan dan Pemantauan Wilayah Rawan Tramtibum	-												

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KO DE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2016)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
							2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
URUSAN LINGKUNGAN HIDUP																		
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup perkotaan	Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Terkelolanya persampahan dan lingkungan hidup dari pencemaran dan perusakan		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Terkelolanya persampahan di wilayah Kecamatan dari Tempat Pembuangan Sementara (TPS) ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA)	180.000.000	100%	275.807.000	100%	303.400.000	100%	333.750.000	100%	367.125.000	100%	403.850.000	100%	1.683.932.000
				2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Adanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan													
				3. Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Persampahan	Terpeliharanya sarana dan prasarana persampahan													
				Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Terwujudnya lingkungan yang bersih, asri/hijau dan nyaman	62.400.000	100%	37.100.000	100%	40.810.000	100%	44.900.000	100%	49.390.000	100%	54.329.000	100%	226.529.000
				4. Koordinasi Penilaian Adipura	Adanya kerja bhakti tingkat kecamatan dan kelurahan													

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KO DE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2016)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
							2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
URUSAN KESEHATAN																		
Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat			Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Menurunnya Angka Kematian Ibu hamil melahirkan (AKI) dan Angka Kesakitan melalui pemberdayaan masyarakat	-	100%	325.480.000	100%	358.028.000	100%	393.830.000	100%	433.213.000	100%	476.535.000	100%	1.987.086.000
				5. Fasilitasi Forum Kota Sehat (FKK) Kecamatan / Kelurahan														
URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT																		
Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kelurahan		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	Prosentase Jumlah kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat (kemasyarakatan) Kelurahan	2.205.720.000	100%	784.190.000	100%	862.610.000	100%	948.871.000	100%	1.043.760.000		1.148.136.000	100%	4.787.567.000
					Fasilitasi penanggulangan kemiskinan													
				6. Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan (Gerbang Hebat)	Adanya pemetaan data warga miskin													
					Adanya kampung tematik													

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KO DE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2016)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
							2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Meningkatnya pembangunan dan kapasitas pemberdayaan masyarakat	Terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kelurahan		7. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan	Adanya kegiatan pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat kelurahan													
				Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan	Prosentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan kelurahan	13.016.665.000	100%	15.177.646.000	100%	16.695.410.000	100%	18.364.950.000	100%	20.201.445.000	100%	22.221.590.000	100%	92.661.041.000
				8. Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Kelurahan	Adanya kegiatan pembinaan kelompok masyarakat pembangunan kelurahan													
				9. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan	Terlaksananya musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan													
				10. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan													
				11. Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Hasil Musrenbang	Adanya kegiatan fasilitasi pelaksanaan pembangunan hasil musrenbang													
				12. Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pembangunan Sarana	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana umum													

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KO DE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2016)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
							2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Prasarana Umum														
				13. Pemberdayaa n Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Jalan dan Jembatan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas jalan dan jembatan													
				14. Pemberdayaa n Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Saluran Lingkungan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas saluran lingkungan													
				15. Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Hasil Musrenbang	Adanya kegiatan fasilitasi kegiatan kemasyarakatan hasil musrenbang													
FUNGSI PENUNJANG (KEUANGAN)																		
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani	1.Terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN	Terwujudnya pelayanan publik yang prima		Program Peningkatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah	Persentase capaian hasil perolehan PBB oleh Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan	120.000.000	100%	4.845.000	100%	5.330.000	100%	5.863.000	100%	6.450.000	100%	7.095.000	100%	29.583.000

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KO DE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2016)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
							2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	2. Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja			16. Optimalisasi Pemungutan PBB oleh Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan	Tercapainya target pemungutan PBB													
	3. Meningkatkan integritas aparatur			17. Monitoring Pengendalian Aset Kecamatan	Terpeliharanya aset-aset pemerintah													
FUNGSI PENUNJANG (PEMERINTAHAN UMUM)																		
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani	1. Terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN			Program Peningkatan dan Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Jumlah Kelurahan yang berbasis PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan)	144.116.000	100%	510.447.000	100%	561.500.000	100%	617.650.000	100%	679.415.000	100%	747.350.000	100%	3.116.362.000
					Cakupan pelayanan administratif kepada masyarakat di Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan													
	2. Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja			18. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Kecamatan	Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tata pemerintahan kecamatan													
	3. Meningkatkan integritas aparatur			19. Pengembangan Budaya Kerja dan Pembinaan Mental Rohani Aparatur	Adanya kegiatan pengembangan budaya kerja dan pembinaan mental rohani aparatur													

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KO DE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2016)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
							2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Terwujudnya pelayanan prima			20. Implementasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)													
				21. Broadband Learning Centre (BLC)	Adanya fasilitas BLC													
PROGRAM – PROGRAM RUTIN																		
1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani	1. Terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya penyelenggaraan administrasi perkantoran	455.152.000	100%	3.592.817.500	100%	3.952.100.000	100%	4.347.310.000	100%	4.782.041.000	100%	5.260.245.000	100%	21.934.513.500
	2. Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja																	
	3. Meningkatkan integritas aparatur				22. Pembayaran Jasa Komunikasi , SDA, Listrik													
	4. Terwujudnya pelayanan prima			23. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor													

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KO DE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2016)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
							2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik				24. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan													
				25. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor													
				26. Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman													
				27. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah														
				28. Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran	Tercukupinya kebutuhan pendukung													
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang memadai	802.280.000	100%	702.994.000	100%	773.300.000	100%	850.630.000	100%	935.693.000	100%	1.029.260.000	100%	4.291.877.000
					Terpeliharanya sarana dan prasarana kerja aparatur													
				29. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Adanya perlengkapan gedung kantor													

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KO DE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2016)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
							2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				30. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Adanya peralatan gedung kantor													
				31. Pemeliharaan rutin/ berkala Rumah Dinas	Terpeliharanya rumah dinas													
				32. Pemeliharaan rutin / berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor													
				33. Pemeliharaan rutin / berkala Kendaraan Dinas	Terpeliharanya kendaraan dinas													
				34. Pemeliharaan rutin/ berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor													
				35. Pemeliharaan rutin/ berkala Mebelair	Terpeliharanya mebelair													
				36. Rehabilitasi sedang/ berat Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor													
				37. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perijinan Kendaraan Dinas	Terbayarnya jasa pemeliharaan perijinan kendaraan dinas													

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KO DE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2016)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
							2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya kapasitas dan kompetensi dan profesionalisme aparatur dalam penyusunan sistem pelaporan kinerja dan keuangan		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan akuntabilitas sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang tertib dan berkelanjutan	144.670.000	100%	189.867.500	100%	208.855.000	100%	229.740.000	100%	252.714.000	100%	277.985.000	100%	1.159.161.500
				38. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Adanya dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah													
				39. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Adanya dokumen Laporan Keuangan Semesteran													
				40. Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	Adanya dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran													
				41. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Adanya dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun													
				42. Penyusunan RKA dan DPA	Adanya dokumen RKA dan DPA													
				43. Penyusunan LKJIP	Adanya LKJIP													

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KO DE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2016)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
							2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				44. Penyusunan Renstra Perangkat Drh	Adanya dokumen Renstra PD													
				45. Penyusunan LKPJ Perangkat Drh	Adanya dokumen LKPJ Perangkat Daerah													
				46. Penyusunan Renja Perangkat Drh	Adanya dokumen Renja Perangkat Daerah													
				47. Penunjang Kinerja PA, KPA, PPK, Bendahara dan Bendahara Pemb.														

BAB VI

INDIKATOR KINERJA KECAMATAN MIJEN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pelaksanaan Program dan Kegiatan Kecamatan Mijen diharapkan dapat mendukung salah tujuan pembangunan daerah tahun 2017-2021.

Dalam rangka mendukung tujuan dan sasaran RPJMD Kota Semarang, Kecamatan Mijen melaksanakan 4 (empat) urusan, 2 (dua) fungsi penunjang dan 3 (tiga) program-program rutin.

Urusan yang dilaksanakan Kecamatan Mijen yaitu:

1. Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat.

Program yang akan dilaksanakan yaitu:

- a. Program Peningkatan Ketentraman dan Kenyamanan Lingkungan, dengan indikator kinerja (otcome) berupa cakupan pemantauan gangguan ketentraman, ketertiban dan kenyamanan lingkungan (6 jenis), yaitu (1) pendampingan patroli, (2) pemantauan pelanggaran perda, (3) monitoring siskamling, (4) piket siaga, (5) kewaspadaan bencana, (6) pendampingan penegakan perda.

2. Urusan Lingkungan Hidup

Program yang akan dilaksanakan yaitu:

- a. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, dengan indikator kinerja (outcome) berupa Terkelolanya persampahan di wilayah Kecamatan dari Tempat Pembuangan Sementara (TPS) ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
- b. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, dengan indikator kinerja (outcome) berupa terwujudnya lingkungan yang bersih, asri/hijau dan nyaman.

3. Urusan Kesehatan

Program yang akan dilaksanakan yaitu:

- a. Program Pengembangan Lingkungan Sehat, dengan indikator kinerja (outcome) berupa menurunnya Angka Kematian Ibu hamil melahirkan (AKI) dan Angka Kesakitan melalui pemberdayaan masyarakat.

4. Urusan Pemberdayaan Masyarakat

Program yang akan dilaksanakan yaitu:

- a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan dengan indikator kinerja (outcome) berupa prosentase jumlah kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat (kemasyarakatan) Kelurahan dan fasilitasi penanggulangan kemiskinan.
- b. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan dengan indikator kinerja (outcome) berupa prosentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan kelurahan.

Selain 4 (empat) urusan diatas, Kecamatan Mijen juga melaksanakan 2 (dua) fungsi penunjang, yaitu:

1. Fungsi Penunjang Keuangan

Program yang dilaksanakan yaitu Peningkatan Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah dengan indikator kinerja (outcome) berupa persentase capaian hasil perolehan PBB oleh Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan.

2. Fungsi Penunjang Pemerintahan Umum

Program yang dilaksanakan yaitu Peningkatan dan Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dengan indikator kinerja (outcome) berupa jumlah kelurahan yang berbasis PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) dan cakupan pelayanan administratif kepada masyarakat di Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan.

Disamping melaksanakan 4 (empat) urusan dan 2 (dua) fungsi penunjang, Kecamatan Mijen melaksanakan program – program rutin untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat. Program – program rutin yang dilaksanakan yaitu:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan indikator kinerja (outcome) berupa terlaksananya penyelenggaraan administrasi perkantoran dan tercukupinya kebutuhan pendukung.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan indikator kinerja (outcome) berupa tersedianya sarana dan prasarana kerja yang memadai dan terpeliharanya sarana dan prasarana kerja aparatur.
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan indikator kinerja (outcome) berupa peningkatan akuntabilitas sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang tertib dan berkelanjutan.

Indikator kinerja Kecamatan Mijen yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL 14

INDIKATOR KINERJA KECAMATAN MIJEN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PROGRAM					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
				TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup perkotaan.	Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.	Terkelolanya persampahan di wilayah Kecamatan dari Tempat Pembuangan Sementara (TPS) ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).	75%	78%	81%	85%	89%	93%
Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup perkotaan.	Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.	Terwujudnya lingkungan yang bersih, asri/hijau dan nyaman.	80%	84%	88%	92%	96%	100%
Pelayanan Administrasi Perkantoran	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani.	Terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN.	Terlaksananya penyelenggaraan administrasi perkantoran.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja.		100%	100%	100%	100%	100%	100%
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatkan kualitas pelayanan publik.	Meningkatnya integritas aparatur.	Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang memadai.	100%	100%	100%	100%	100%	100%

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PROGRAM					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
				TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Terwujudnya pelayanan prima.	Terpeliharanya sarana dan prasarana kerja aparatur.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatkan kualitas pelayanan publik.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.	Peningkatan akuntabilitas sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang tertib dan berkelanjutan.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.	Meningkatnya pembangunan dan kapasitas pemberdayaan masyarakat.	Prosentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan kelurahan.	80%	84%	88%	92%	96%	100%
Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat.	Prosentase Jumlah kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat (kemasyarakatan) Kelurahan.	80%	84%	88%	92%	96%	100%
			Fasilitasi penanggulangan kemiskinan.	75%	78%	81%	84%	87%	90%

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PROGRAM					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
				TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Peningkatan Ketentraman dan Kenyamanan Lingkungan	Mewujudkan wilayah Kecamatan yang tentram, tertib dan nyaman.	Meningkatnya ketentraman dan kenyamanan masyarakat	Cakupan pemantauan gangguan ketentraman, ketertiban dan kenyamanan lingkungan meliputi 6 (enam) kegiatan: Pemantauan pelanggaran Perda, Pendampingan penegakan Perda, Pemantauan Siskamling, Patroli wilayah, Piket Kesiagaan, dan Siaga bencana.	-	68%	71%	74%	77%	80%
Pengembangan Lingkungan Sehat	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Menurunnya Angka Kematian Ibu hamil melahirkan (AKI) dan Angka Kesakitan melalui pemberdayaan masyarakat.	-	70%	75%	80%	85%	90%
Peningkatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani.	Terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN.	Persentase capaian hasil perolehan PBB oleh Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan.	80%	84%	88%	92%	96%	100%
		Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja.							
		Meningkatnya integritas aparatur.							

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PROGRAM					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
				TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Peningkatan dan Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani	Terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN.	Jumlah Kelurahan yang berbasis PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan).	66%	73%	80%	87%	93%	100%
	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja.	Cakupan pelayanan administratif kepada masyarakat di Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan.	80%	84%	88%	92%	96%	100%
		Meningkatnya integritas aparatur.							
		Terwujudnya pelayanan prima.							

BAB VII

PENUTUP

Penetapan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka mendukung Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih, tidak terlepas dari aspek pengukurannya, sehingga memiliki nilai akuntabilitas yang tinggi. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut diharapkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Kota Semarang, khususnya di wilayah Kecamatan Mijen. Oleh karena itu, untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis, diperlukan pengukuran dan evaluasi kinerja.

Pengukuran kinerja dimaksud untuk memberi penilaian terhadap prestasi yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya penyusunan Renstra ini merupakan pedoman taktis strategis dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode tahun 2017 - 2021. Strategi atau cara pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini berisi tentang program dan kegiatan-kegiatan yang disesuaikan dengan RPJMD Kota Semarang 2017 - 2021 dan merupakan komitmen bersama bagi seluruh komponen organisasi Kecamatan Mijen Kota Semarang.

Program-program dan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam Renstra ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam Renja dan sebagai dasar penyusunan program kerja organisasi Kecamatan Mijen Kota Semarang.

Meskipun renstra sudah mencakup berbagai program dan kegiatan yang direncanakan, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan pula dengan situasi dan kondisi yang ada serta selalu memperhatikan arah kebijakan umum Pemerintah Kota Semarang.

Seluruh tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis ini, mustahil dapat dicapai tanpa dibarengi dengan koordinasi dan kerja sama yang baik dengan seluruh *stake holders* yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

Namun demikian, dengan semangat untuk mewujudkan Visi Walikota dan Wakil Walikota Semarang yaitu “*Semarang Kota Perdagangan dan Jasa yang HEBAT Menuju Masyarakat Semakin Sejahtera*” tersebut dapat tercapai melalui kinerja semua komponen organisasi Kecamatan Mijen sehingga dapat dan mampu memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat.

Semarang, Oktober 2016



KECAMATAN MIJEN
SEMARANG
ALI MUHTAR, S.Sos, MM.
Pembina Tk. I
NIP. 19701107 199101 1 001